

Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

Perangkat Daerah : DPMPTSP

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.		V	belum ada file/dokumen tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	Untuk dicukupi
2	Pengolahan data dan informasi.		V	1. pada Latar belakang belum ada uraian keterkaitan antara RENJA PD dengan RKPD maupun Renstra 2. Beberapa perundang-undangan perlu diupdate dan disesuaikan	di update dan disesuaikan
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		V	Indikator Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi, Tidak sesuai RKPD  Indikator dan target kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Pennaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah yaitu Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu target 1500 izin , Tidak sesuai RKPD	diubah menjadi jumlah investor yang menyatakan berminat dalam promosi sesuai RKPD  seharusnya Persentase Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu satuan persen  DOWNLOAD KEMBALI SIPD RANWAL DAN RANKHIR
7	Perumusan tujuan dan sasaran		V	Target indikator tujuan PD 2023 belum ada di tabel 3.1	diisikan
8	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	V			

11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.		V	Belum ada	Untuk dicukupi

Pejabat dari Perangkat Daerah yang hadir :  
Penyusun Program/Perencana Ahli Muda

  
PALUVITA CHAMIDASARI, S.Pi, MM  
NIP.19831204 201001 2 028

Pasuruan, 23 Juni 2022

Pejabat Verifikator :  
Perencana Ahli Muda

  
IMAM BUCHORI, S.STP, M.Si  
NIP.19850624 200312 1 002

Mengetahui :

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

  
**LAILIYA AMKA, ST, MT**

NIP. 19760602 200604 2 017

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

NIP.19771206 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor. 26 B PASURUAN 67126 Jawa Timur  
Telepon/ Fax. (0343) 422754 Email: dpmpstp@pasuruankota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN**

**NOMOR 188/ /423.107/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang atau Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai pedoman perencanaan kegiatan pembangunan SKPD selama 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang sebagaimana pada huruf a diatas, mengamanatkan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, dan Walikota Pasuruan telah menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014–2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

37. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
38. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
39. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
40. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor                    Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pasuruan  
Pada tanggal :

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**  
Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor. 26 B PASURUAN 67126 Jawa Timur  
Telepon/ Fax. (0343) 422754 Email: dpmpmsp@pasuruankota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN**

**NOMOR 188/1164 /423.107/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
PASURUAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
-

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
-

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

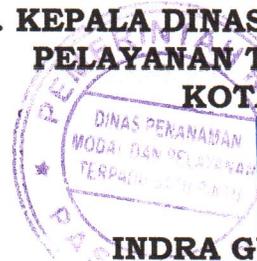
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
1. Menghimpun, memilah, dan menganalisa bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
  2. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan agenda dan jadwal penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Menyusun laporan pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
5. Menyusun rancangan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
6. Menetapkan rancangan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pasuruan  
Pada tanggal :

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005





**Pemerintah Kota Pasuruan**

# **RENJA**

## **RENCANA KERJA**

# **2023**

**DPMPTSP**  
KOTA PASURUAN

Jl. Pahlawan No. 26 B  
Pasuruan  
0343-427754

## PENDAHULUAN

BAB  
I**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yang sekiranya dapat menjadi penyempurnaan kinerja DPMPTSP untuk peningkatan kinerja realisasi investasi Sistem Pelayanan Perijinan.

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja DPMPTSP Kota Pasuruan disusun dengan melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

❖ Pembentukan tim penyusun

Anggota tim penyusun Renja adalah pejabat dan staf yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja yang merupakan perwakilan

dari setiap bidang yang ada yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan serta memahami substansi tugas dan fungsi PD.

❖ Orientasi mengenai Renja

Orientasi diberikan untuk menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan Renja PD, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan terkait, serta untuk mengetahui aspek–aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

❖ Penyusunan agenda kerja

Agenda kerja disusun dengan memerinci setiap tahapan untuk perubahan kegiatan dalam kegiatan penyusunan dokumen Renja dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Renja.

❖ Pengumpulan data dan informasi

Setiap perubahan usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja yang sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan untuk mengakomodasi kepentingan investor/ pengusaha guna memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi.

Dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perencanaan program dan kegiatan tersebut dimanifestasikan melalui program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan serta Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Terkait dengan itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tahun 2023 berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengoptimalkan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpatokan pada dokumen perencanaan tingkat kota dan Renstra serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan

dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 adalah untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja anggaran PD. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP adalah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibidang Pelayanan Publik serta mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal, selain itu dapat terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan kode rekening dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dimanifestasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala PD

Daftar Isi

##### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat

##### **Bab III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023

4.2 Pemetaan Sasaran terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD

4.3 Rekapitulasi Program Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional

**Bab IV Penutup**

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### BAB II

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra DPMPTSP meliputi kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, selanjutnya akan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 dimana pelaksanaannya didukung oleh 6 program, 13 kegiatan, dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran senilai Rp. 6.937.050.474 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Namun terjadi Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) dimana pelaksanaannya terdiri dari 6 Program, 12 Kegiatan (berkurang 1 kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah), dan 29 Sub Kegiatan (berkurang 2 Sub Kegiatan yaitu; 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan Anggaran Total senilai Rp. 7.059.963.225,- (Tujuh Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Jumlah total bertambah dikarenakan percepatan untuk fasilitas Mall Pelayanan Publik Kota Pasuruan. Sampai dengan akhir tahun 2021 anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 6.065.829.723 ( Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh

Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau tingkat serapannya mencapai 85,92%.

Keberhasilan capaian ini dikarenakan beberapa faktor antara lain meningkatnya motivasi kinerja aparatur DPMPTSP untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai target, meningkatnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapaun rincian capaian program prioritas sebagai berikut :

### 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pelaksanaan Program PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan Dinas. Program tersebut diukur dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan jumlah investor (dengan satuan Persen). Indikator tersebut terdiri dari data Jumlah Investor tahun ini dan data Investor tahun sebelumnya. Presentase peningkatan jumlah investor dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{Investor tahun } n - \Sigma \text{Investor tahun } (n-1)}{\Sigma \text{Investor tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berikut tampilan data pendukung Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku usaha

NO	Bulan	Jumlah NIB yang berinvestasi Tahun 2020	Jumlah NIB yang berinvestasi Tahun 2021
1	Januari	11	17
2	Februari	11	15
3	Maret	9	18
4	April	9	13
5	Mei	7	11
6	Juni	9	14
7	Juli	8	9
8	Agustus	6	6
9	September	11	3
10	Oktober	10	1
11	Nopember	9	7
12	Desember	7	8
Jumlah		107	122

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pada tahun 2020 terdapat jumlah pelaku usaha sebanyak 107 pelaku usaha yang berinvestasi di kota pasuruan. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan sebanyak 122 pelaku usaha. Sehingga jumlah investor mengalami peningkatan sebesar 14 % dari target sebesar 20% dan tercapai 70 %, hal ini tidak memenuhi target karena di tahun 2021 terdapat permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha yaitu kondisi pandemi tidak kunjung usai sehingga menghambat pelaksanaan berusaha di Kota Pasuruan.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun indikator kegiatan adalah Jumlah Investor. Data yang dibutuhkan untuk menghitung Jumlah Investor yaitu Data Jumlah Pelaku usaha dengan formulasi sebagai berikut :

### $\Sigma$ Investor tahun n

Berikut data pendukung dari Indikator Kegiatan:

**Tabel 1.2 Jumlah Pelaku usaha tahun 2021**

NO	Bulan	Jumlah NIB yang berinvestasi Tahun 2021
1	Januari	17
2	Februari	15
3	Maret	18
4	April	13
5	Mei	11
6	Juni	14
7	Juli	9
8	Agustus	6
9	September	3
10	Oktober	1
11	Nopember	7
12	Desember	8
Jumlah		122

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Dari tabel 1.2 dapat di lihat bahwa jumlah pelaku usaha yang telah berinvestasi di Kota Pasuruan sebanyak 122 pelaku usaha dari target sebesar 100 pelaku usaha dan tercapai 122 %. Adapun faktor pendukungnya adalah kemudahan dalam mengurus perizinan yang bisa diakses secara online di [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), mengadakan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan sarana prasarana yang menunjang untuk berinvestasi di kota pasuruan.

Besaran anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2021 Rp. 18,373,869,00 dengan realisasi Rp. 5.006.150,00 dengan capaian 27,25 persen. Capaian Anggaran tersebut sangat minim dikarenakan kesalahan kode rekening yang seharusnya masuk ke Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, namun kesalahannya masuk ke rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor sehingga tidak dapat di Realisasikan.

## 2. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal memiliki indikator Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan. Indikator tersebut terdiri Jumlah data Kuisisioner yang Puas dan Jumlah data Kuisisioner yang masuk, dengan formulasi:

$$= \frac{\Sigma \text{Kuisisioner yang puas}}{\Sigma \text{Kuisisioner yang masuk}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021 indikator Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan di targetkan sebesar 70 % dan terealisasi sebesar 95,54 % (dari rata-rata di semester I 100% dan pada semester II sebesar 91,07 %) dengan capaian sebesar 136,48% . Ketercapaian indikator tersebut diperoleh dari jumlah responden yang puas sebanyak 114 orang dari 119 kuisisioner yang masuk selama tahun 2021. Faktor pendorong Ketercapaian target indikator ini di dikarenakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani masyarakat dengan baik sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan.

Dari Gambaran Pencapaian indikator Program Pelayanan Penanaman Modal dapat di lihat pada tabel berikut :

**3.1 Tabel Data Responden Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH RESPONDEN		KET
		PUAS	TIDAK PUAS	
1	Januari	11	-	
2	Februari	13	-	
3	Maret	21	-	
4	April	7	-	
5	Mei	5	-	
6	Juni	6	-	
<b>JUMLAH SKM SMT I</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
7	Juli	7	-	
8	Agustus	5	-	
9	September	34	5	
10	Oktober	3	-	
11	Nofember	-	-	
12	Desember	-	-	
<b>JUMLAH SKM SMT II</b>		<b>51</b>	<b>5</b>	<b>91,07%</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Program Pelayanan Penanaman Modal didukung oleh 1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kegiatan Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang terdiri dari Data Jumlah Layanan Perizinan dan data Jumlah layanan Non Perizinan dengan Formulasi di bawah ini:

**=  $\Sigma$  layanan perizinan +  $\Sigma$  layanan non perizinan**

Indikator tersebut di dukung oleh data dibawah ini:

**3.3 TABEL DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

NO	URAIAN	JUMLAH IZIN	KET
1	Perizinan	391	
2	Non Perizinan	1.111	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.502</b>	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Tahun 2021 Indikator Kegiatan Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu ditargetkan 1.650 izin dan terealisasi 1.502 izin, presentase capaian senilai 91.03%. Ketercapaian tersebut dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat untuk memproses perizinan berusaha melalui OSS.

Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.146.731.944 dan terealisasi sebesar Rp. 1.872.840.615 Atau dengan capaian sebesar 87,24 %.

### 3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Informasi Pengembangan dan Pengaduan mengampu Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengolahan data serta memelihara dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur dengan indikator yaitu : *Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan*. Indikator ini terdiri dari Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang di publikasikan tahun ini dan Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang di publikasikan tahun sebelumnya.

Formulasi pengukuran program ini adalah :

$$= \frac{\Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun } (n) - \Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun } (n-1)}{\Sigma \text{ jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yg di publikasikan tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Pada Tahun 2021 Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal dengan Indikator Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan dengan Data dan pengukuran peningkatan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di publikasikan

No	Jenis Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Social Media (Instagram)	20	74
2	Social Media (Facebook)	37	66
3	Social Media (Website)	15	41
4	Buku Profil	0	1x (71 eksemplar)
5	Banner	7	2
6	Spanduk	9	6
7	Baliho	7	3
8	Sosialisasi	0	1x (75 peserta)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Pelaksanaan Penyebarluasan informasi perijinan dan pengaduan dilakukan dari beberapa bentuk :

1. Media Cetak terdiri dari Banner, Spanduk, Baliho dan Buku Profil
2. Media Elektronik terdiri dari Instagram, Facebook dan Website
3. Sosialisasi Mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota.
4. Data Perijinan yang terdiri dari : Ijin Prinsip, Ijin Usaha, Ijin Apotik, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Operasional, Ijin Pemakaian Pemanfaatan Tanah Drainase, Ijin Trayek, Ijin TDUP, Ijin SIUP.

Pada Tahun 2021 dari Target 15 % dan terealisasi 33,3 %, dengan capaian sebesar 222 %, capaian ini berdasarkan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan tahun 2021 sejumlah 8 jenis data dibandingkan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan tahun 2020 sejumlah 6 jenis data. Ketercapaian ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu dari berbagai data dan informasi informasi penanaman modal media informasi dan publikasi yang berpengaruh dalam menunjang kesuksesan pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPTSP.

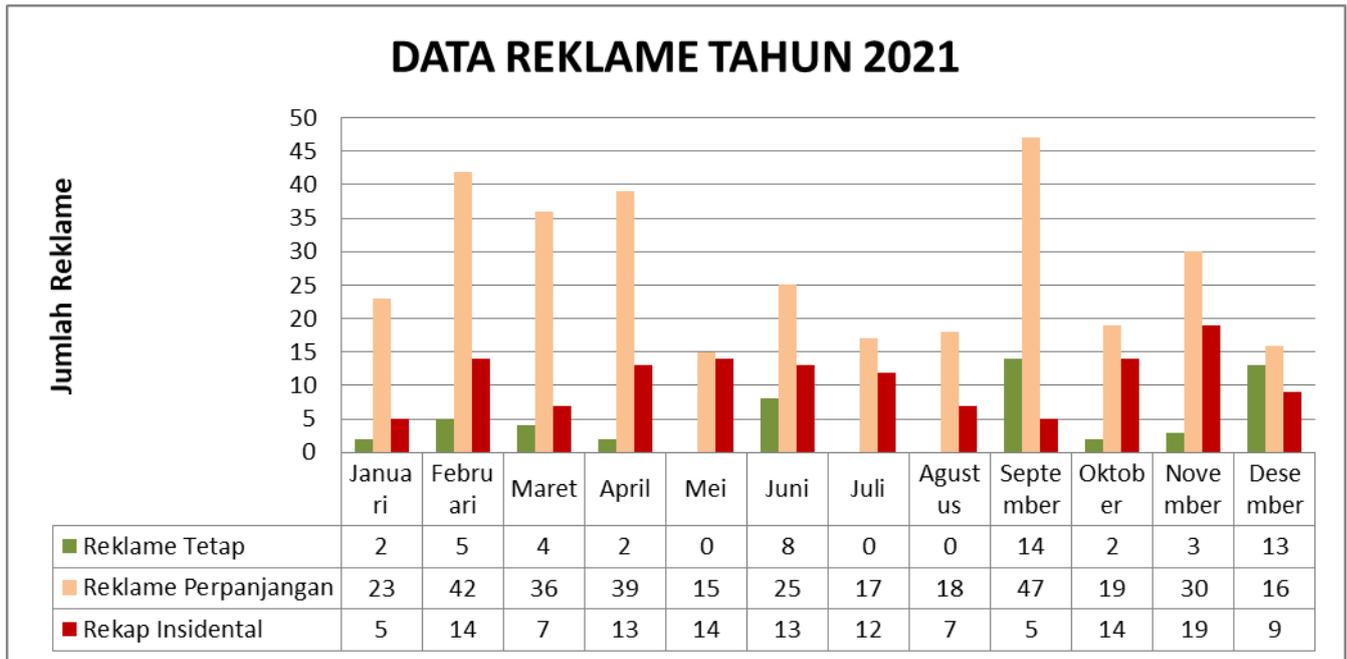
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengampu 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota di ukur dengan Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasikan tahun ini.

Formulasi pengukuran program ini adalah :

*Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang terintegrasikan tahun (n).*

Pada Tahun 2021 target kinerja Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan data yang terintegrasikan sejumlah 256 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 512 pelaku usaha dengan capaian kinerja 200 %. Definisi data yang terintegrasikan adalah data yang terhubung langsung dengan OPD secara online atau cepat terupdate yaitu Bapenda, DPMPTSP dan Satpol PP.

Sebagai bahan pendukung, berikut di lampirkan Data Reklame Tahun 2021, yang terdiri dari Reklame Tetap, Reklame Perpanjangan, dan Reklame Insidental.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 181.052,760,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dan tercapai sebesar Rp. 160.409.670 (Seratus enam puluh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rata-rata ketercapaian kegiatan ini 89 persen.

#### 4. Program Promosi Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan satu Indikator yaitu Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat. Program tersebut memiliki Indikator Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi. Indikator ini terdiri dari data Jumlah Investor yang

berminat promosi pada tahun 2021 dan data Jumlah Investor yang berminat promosi pada tahun 2021.

Presentase peningkatan nilai investasi dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } n - \Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } (n-1)}{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berikut data pendukung Program Promosi Penanaman Modal.

**Tabel. 2.1 Jumlah Investor**

NO	Bulan	Jumlah investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) Tahun 2020	Jumlah investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) Tahun 2021
1	Januari	2	6
2	Februari	3	5
3	Maret	2	6
4	April	4	3
5	Mei	2	2
6	Juni	3	5
7	Juli	2	4
8	Agustus	1	3
9	September	8	0
10	Oktober	6	0
11	Nopember	5	5
12	Desember	2	6
Jumlah		40	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dari tahun 2020 sebanyak 40 investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) dimana terdapat peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 45 investor, atau mengalami peningkatan sebanyak 12,50% dari target yang ada sebesar 10% dengan capaian 125 %, hal ini

dikarenakan kemudahan dalam mengurus perizinan yang bisa diakses secara online di [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) , mengadakan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan sarana prasarana yang menunjang untuk berinvestasi di kota pasuruan

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator yaitu presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi dengan formulasi :

$$\frac{\Sigma \text{ Investor yang berminat (yang memiliki ijin yang sudah efektif) tahun } n}{\Sigma \text{ Investor tahun } n} \times 100\%$$

Berikut data pendukung dari Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota :

**Tabel. 2.2 Jumlah Pelaku usaha tahun 2021**

NO	Bulan	Jumlah investor Tahun 2021	Jumlah investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) Tahun 2021
1	Januari	17	6
2	Februari	15	5
3	Maret	18	6
4	April	13	3
5	Mei	11	2
6	Juni	14	5
7	Juli	9	4
8	Agustus	6	3
9	September	3	0
10	Oktober	1	0
11	Nopember	7	5
12	Desember	8	6
Jumlah		122	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 diatas pada tahun 2021, investor yang berminat (memiliki ijin yang sudah efektif) sejumlah 45 dari total jumlah investor pada tahun 2021 sejumlah 122 maka persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi terealisasi sebesar 36,89% dari target sebesar 10% dengan capaian 368,9 %, hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengurus perizinan yang bisa diakses secara online di [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), mengadakan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan berusaha berbasis resiko dan sarana prasarana yang menunjang untuk berinvestasi di Kota Pasuruan.

Adapun berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung terciptanya Iklim Investasi antara lain kegiatan Pameran promosi potensi dan peluang investasi, Penjajakan kerjasama antar daerah bidang Penanaman Modal, Evaluasi dan pelaporan perkembangan investasi dan Pembinaan dan pengawasan ijin dan non perijinan bidang penanaman modal. Hal ini didukung oleh ketersediaannya anggaran yang memadai serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran anggaran Program Promosi Penanaman Modal tahun 2021 Rp. 214.360.266,00 dengan realisasi Rp. 170.362.500,00 dengan serapan sebesar 79,47 %.

## 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung dengan 1 kegiatan. Program diukur dengan satu Indikator yaitu Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal dengan Formulasi:

$$\frac{\sum \text{Pelaku usaha yang tertib (dipantau dan diawasi)} \times 100}{\sum \text{Pelaku usaha yang dibina}}$$

Berikut data pelaku usaha yang telah tertib pelaksanaan penanaman modalnya dan telah dibina.

**Tabel 4.1 Pelaku usaha yang tertib tahun 2021**

NO	Tribulan	Pelaku usaha yang tertib	Pelaku usaha yang dibina	Pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha yang diawasi
1	Tribulan I	67		62	5
2	Tribulan II	57		47	10
3	Tribulan III	39		29	10
4	Tribulan IV	39	232	34	5
Jumlah		202	232	172	30

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Dari tabel 4.1 diatas jumlah pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal sebesar 202 pelaku usaha. Sedangkan jumlah pelaku usaha yang dibina sebanyak 232. Pada tahun 2021 persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 87,07% atau tercapai 124,39%. Capaian ini berdasarkan jumlah pelaku usaha yang tertib (yang dipantau dan diawasi) pelaksanaan penanaman modal sejumlah 202 dibandingkan jumlah pelaku usaha yang dibina sejumlah 232 pelaku usaha. Ketercapaian ini dikarenakan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM dan kesesuaian pelaksanaan usaha dengan dokumen perizinan yang dimiliki.

Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator yaitu Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi dengan formulasi :

**$\Sigma$  pelaku usaha yang dipantau dan diawasi**

Berikut Data Pendukung Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota:

**Tabel 4.2 Pelaku usaha yang dipantau dan diawasi tahun 2021**

NO	Tribulan	Pelaku usaha yang dipantau	Pelaku usaha yang diawasi
1	Tribulan I	62	5
2	Tribulan II	47	10
3	Tribulan III	29	10
4	Tribulan IV	34	5
Jumlah		172	30

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021*

Dari tabel 4.2 diatas, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 30 pelaku usaha yang dipantau dan 30 pelaku usaha yang diawasi dan terealisasi jumlah pelaku usaha yang dipantau 172 pelaku usaha dan yang diawasi sebanyak 30 pelaku usaha dengan capaian 337%. Adapun faktor pendukung dari hasil pelaksanaan kegiatan banyak pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan sesuai dengan pelaksanaan usahanya.

Besaran anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2021 Rp. 433.784.600,00 dengan realisasi Rp. 203.779.000,00 dengan capaian 46,98 persen. Realisasi Anggaran tersebut tergolong minim dikarenakan Juknis DAK tidak sesuai dengan Juknis Perwali yang mengatur SHS.

Pada Tahun 2022 dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dapat diketahui bahwa realisasi kinerja program dan kegiatan Renja serta serapan anggaran tahun 2022 diposisi tribulan II bulan Juni masih dibawah 50% tepatnya sebesar 24,98%. Dan untuk realisasi capaian program kegiatan sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan kurang dari 100%. Besaran anggaran Dinas Penanaman Modal dan pelyanan terpadu satu Pintu Kota pasuruan tahun

2022 sebesar Rp. 7.645.304.889,00 dengan serapan pada tribulan II yaitu bulan Juni sebesar Rp. 1.971.288.672,00. Terdapat 1 (satu) program rutin dan 5 (lima) program pendukung pembangunan urusan penanaman modal akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan total anggaran Rp. 4.222.614.300,00 dengan realisasi tribulan I bulan maret 2022 sebesar Rp. 233.376.530,00 atau sebesar 29,08%. Program ini diukur dengan indikator persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang terfasilitasi 90% dengan capaian di tribulan I atau semester I sebesar 40%.

**b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program tersebut diukur dengan satu indikator yaitu Persentase peningkatan jumlah investor (dengan satuan Persen). Indikator tersebut terdiri dari data Jumlah Investor tahun ini dan data Investor tahun sebelumnya. Sampai di tribulan I peningkatan jumlah investor sebesar 6%, anggaran yang menunjang pada program ini sebesar Rp. 153.669.920,00 dan terealisasi pada tribulan I bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%. Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

**c. Program Promosi Penanaman Modal**

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 129.006.520,00, sampai di tribulan II bulan Mei tahun 2022 belum ada realisasi atau sebesar 0 %, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, hal ini dikarenakan DPMPTSP Kota Pasuruan menyesuaikan jadwal kegiatan Promosi atau Pameran Propinsi yang kemungkinan dilaksanakan pada Tribulan ke III . Program promosi penanaman modal terukur dengan target Indikator Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi 20%, target

ini belum tercapai karena sub kegiatan yang mendukung masih belum terlaksana.

**d. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Terukur dengan target indikator Prosentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan 80%. Dari hasil survey kuisisioner kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan di tribulan I sebesar 0%. Anggaran yg mendukung program ini adalah sebesar Rp. 2.444.957.250,00, dan terealisasi sebesar Rp. 79.783.140,00 pada tribulan I bulan Maret tahun 2022, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Anggaran yang tersedia pada program ini sebesar Rp. 392.474.220,00 dan terealisasi pada tribulan I bulan Maret 2022 sebesar Rp. 19.799,00. Terukur dengan target indikator persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal 70%. Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada penanam modal dalam tribulan I capaian kinerja 30%.

**f. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.**

Target indikator persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan 15%, pengelolaan data dan pemanfaatan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan mencapai 2.25%, pada Program ini terealisasi sampai di tribulan I bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp. 18.150.000,00 dan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 303.698.980,00 atau sebesar 2,25%. Program pengembangan data dan system informasi penanam modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Tahun 2021, Sampai dengan Tribulan I bulan Maret tahun 2022 DPMPTSP Kota Pasuruan, lebih jelas disajikan pada tabel 2.1



2	18	2	12	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90	80	89%	80
2	18	2	12	01	01.2	1		Kegiatan Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90	90	100%	90
2	18	2	12	01	01.2	1	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	3	3	100%	3
2	18	2	12	01	01.2	1	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	7	7	100%	7
2	18	2	12	01	01.2	1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	80	80	100%	80
2	18	2	12	01	01.2	2	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan	14	14	100%	14



2	18	2	12	01	01.2	5	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang diikuti	12	4	33%	4
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>01.2</b>	<b>6</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	18	2	12	01	01.2	6	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7	7	100%	7
2	18	2	12	01	01.2	6	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	6	100%	6
2	18	2	12	01	01.2	6	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan surat kabar	12	12	100%	12
2	18	2	12	01	01.2	6	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaannya makanan dan minuman	389	383	98%	383
2	18	2	12	01	01.2	6	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	152	152	100%	152

2	18	2	12	01	01.2	7		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>				-	-	0%		0
2	18	2	12	01	01.2	7	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				-	-	0%		0
2	18	2	12	01	01.2	8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>				100	100	100%		100
2	18	2	12	01	01.2	8	01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan				478	478	100%		478
2	18	2	12	01	01.2	8	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang				12	12	100%		12
2	18	2	12	01	01.2	8	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor dan petugas keamanan kantor				3	3	100%		3
									Jumlah jasa tenaga honorer non PNS				6	6	100%		6
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia				29	29	100%		29
2	18	2	12	01	01.2	9		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang</b>				100	90	90%		90

								Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpelihara								
2	18	2	12	01	01.2	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang tersedia			3,816	3,674	96%		3674	
									Jumlah penggantian minyak pelumas				24	24	100%		24
									Jumlah penggantian suku cadang				8	8	100%		8
									Jumlah service kendaraan dinas/operasional				8	8	100%		8
									Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan				8	8	100%		8
2	18	2	12	01	01.2	9	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM yang tersedia			2,340	2,250	96%		2250	
									Jumlah penggantian minyak pelumas				27	27	100%		27
									Jumlah penggantian suku cadang				5	5	100%		5
									Jumlah service kendaraan dinas/operasional				5	5	100%		5

										Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan				5	5	100%			5	
2	18	2	12	01	01.2	9	06			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			34	34	100%			34	
2	18	2	12	01	01.2	9	09			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia			16	16	100%			16	
2	18	2	12	01	02					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor			20	14	70%			14	
2	18	2	12	01	05.2	01				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor			100	122	122%			122	
2	18	2	12	01	05.2	01	01			Sub kegiatan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal				-	0%			0	
2	18	2	12	01	05.2	01	02			Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah buku data perkembangan investasi			50	1	2%			1	

2	18	2	12	01	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat			10	12.5	125%			13
2	18	2	12	01	03.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi			10	36.89	369%			37
2	18	2	12	01	03.2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah peserta temu usaha bidang penanaman modal			50	49	98%			49
2	18	2	12	01	03.2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi potensi investasi yang diikuti Jumlah potensi investasi yang diikuti			1	1	100%			1
2	18	2	12	01	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perijinan			70	95.54	136%			96
2	18	2	12	01	04.2	01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu			1,650	1,502	91%			1502

2	18	2	12	01	04.2	01	01		Jumlah blanko formulir izin yang tercetak	2,300	124	5%	124
								Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rapat tim teknis yang terlaksana	20	4	20%	4
									Jumlah sarana dan prasarana pelayanan terpadu satu pintu	1	1	100%	1
2	18	2	12	01	04.2	01	02		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah berita acara survei penelitian lapang yang diterbitkan	750	250	33%
								Jumlah rapat tim teknis perizinan yang terlaksana		75	60	80%	60
2	18	2	12	01	04.2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti	12	2	17%	2
									Jumlah peserta peningkatan wawasan dan kompetensi aparatur	70	70	100%	70

									DPMPTSP Kota											
									Jumlah responden yang disurvei			150	150	100%					150	
									Jumlah terlaksananya pendampingan dan audit ISO 9001:2015			1	1						1	
2	18	2	12	01	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal			256	202	79%					202	
2	18	2	12	01	05.2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi			60	172	287%					172	
2	18	2	12	01	05.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau			30	30						30	

2	18	2	12	01	05.2	01	02	sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	256	230	90%	230
2	18	2	12	01	05.2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	30	14		14
2	18	2	12	01	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	15	33.3	222%	33
2	18	2	12	01	06.2	01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	256	512	200%	512
2	18	2	12	01	06.2	01	01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah aplikasi yang dibangun	1	-	0%	0
								Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	-	0%	0

								Jumlah buku profil investasi yang dicetak	50	103	205%		103	
								Jumlah buku realisasi perizinan yang dicetak	36	-	0%		0	
								Jumlah peserta sosialisasi mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota	75	75	100%		75	
								Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan	6	4	75%		4	
								Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan	40	6	15%		6	
								Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan	1	500	500		500	

									Jumlah rehab reklame			1	2	198%		2	
<b>TAHUN 2022</b>																	
2									URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0	
2	18								Urusan Wajib Penanaman Modal					47.50		48	
2	18	2	12	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90			90	90	100%	
2	18	2	12	01	01.2	1			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90			90	90	100%	
2	18	2	12	01	01.2	1	01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun Jumlah dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	15			6	6	37%	
2	18	2	12	01	01.2	1	06		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang	35			15	15	43%	



2	18	2	12	01	01.2	5		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya</b>	90								80	80	89%
2	18	2	12	01	01.2	5	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	20								5	5	25%
2	18	2	12	01	01.2	5	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerohanian yang diikuti	60								12	12	20%
2	18	2	12	01	01.2	6		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran</b>	90								90	90	100%
2	18	2	12	01	01.2	6	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35								7	7	20%
2	18	2	12	01	01.2	6	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	30								7	7	23%
2	18	2	12	01	01.2	6	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jasa bacaan surat kabar harian (bulan)	60								12	12	20%

2	18	2	12	01	01.2	6	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaannya makanan dan minuman	1945					60	60	3%
2	18	2	12	01	01.2	6	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	195					125	125	64%
2	18	2	12	01	01.2	7		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah</b>	80					80	80	100%
2	18	2	12	01	01.2	7	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10					4	4	40%
2	18	2	12	01	01.2	8		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran</b>	70					70	70	100%
2	18	2	12	01	01.2	8	01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	2390					300	300	13%
2	18	2	12	01	01.2	8	02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang	60					12	12	20%



								Operasional atau Lapangan	Jumlah penggantian suku cadang	25						5	5	20%
									Jumlah service kendaraan dinas/operasional	25						5	5	20%
									Jumlah surat ijin kendaraan dinas yang terselesaikan	25						5	5	20%
2	18	2	12	01	01.2	9	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	170						57	57	34%
2	18	2	12	01	01.2	9	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	80						17	17	21%
2	18	2	12	01	02			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>20</b>						<b>20</b>	20	100%
2	18	2	12	01	05.2	01		<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase investor yang menyatakan berminat</b>	<b>100</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
2	18	2	12	01	05.2	01	01	Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Walikota tentang Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	5						1	1	20%

2	18	2	12	01	05.2	01	02	Sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah data perkembangan investasi	250						4	4	2%
2	18	2	12	01	05.2	02		<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	<b>peningkatan jumlah investor</b>	<b>100</b>						<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20%</b>
2	18	2	12	01	05.2	02	02	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	5						1	1	20%
2	18	2	12	01	03			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	<b>10</b>						<b>10</b>	10	100%
2	18	2	12	01	03.2	01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	<b>10</b>						<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
2	18	2	12	01	03.2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen EIPRO	250						1	1	0%
2	18	2	12	01	03.2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah promosi potensi dan peluang investasi	5						1	1	20%



								yang terlaksana											
2	18	2	12	01	04.2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penanganan pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti	60						0	0%		
		2	12	01									12	12	20%				
												Jumlah penyusunan SPP	5				1	1	20%
												Jumlah peserta peningkatan wawasan dan kompetensi aparaturnya DPMPTSP	250				50	50	20%
												Jumlah responden yang disurvei	1000				200	200	20%
							Jumlah souvenir yang dibagikan	250				50	50	20%					
							Jumlah tenaga admin non PNS	10				2	2	20%					
2	18				04.2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah							0	0%			
2	18	2	12	01	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	70						70	70	100%		

2	18	2	12	01	05.2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Tertib Pelaksanaan Penanaman Modal	2500						180	180	7%
2	18	2	12	01	05.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	450						90	90	20%
2	18	2	12	01	05.2	01	02	sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	1,280						256	256	20%
2	18	2	12	01	05.2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	450						90	90	20%
2	18	2	12	01	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	15						15	15	100%
2	18	2	12	01	06.2	01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah	Jasa Publikasi	75						15	15	20%

								Kabupaten/ Kota										
2	18	2	12	01	06.2	01	01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi yang dipelihara	5						-	0	0%
									Jumlah peserta sosialisasi mekanisme perizinan dan pengaduan tingkat kota	200						40	40	20%
									Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan pengaduan melalui media cetak	25						3	3	12%
									Jumlah publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan	25						5	5	20%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja program Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:

### 1. Nilai Investasi

Target nilai realisasi investasi tahun 2022 Rp. 250.264.058.400,00 dan terealisasi tribulan I bulan Maret 2022 sebesar Rp. 76.206.944.200,00. Realisasi penanaman modal terdiri dari 23 sektor untuk saat ini nilai tertinggi yang pertama pada sektor Perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp. 37.545.184.200,00, yang kedua sektor perdagangan sebesar Rp. 10.165.810.000,00 dan yang ketiga sektor Jasa Lainnya sebesar Rp. 9.614.810.000,00.

Adapun berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung meningkatnya realisasi penanaman modal di Kota Pasuruan yaitu:

- Program promosi penanaman modal, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sub kegiatan penyusunan startegi promosi penanaman modal dan sub kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/ Kota.
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal,

dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pada tahun 2021 nilai investasi Rp. 252.987.816.400,00 jika diukur dengan tahun 2020 sebesar Rp. 245.952.766.000 mengalami kenaikan. Berdasarkan nilai realisasi investasi Kota Pasuruan tahun 2021 terdiri dari 18 sektor, sektor tertinggi berasal dari bidang perumahan dan ruko yaitu sebesar Rp. 127.423.672.700,00 dan sektor terendah berasal dari bidang usaha Peternak yaitu sebesar Rp 31.000.000,00.

## **2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal**

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu kota Pasuruan pada semester I dan semester II tahun 2022 masih dalam proses analisa atau perhitungkan dari hasil survei responden pengguna layanan perizinan.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- Program pelayanan penanaman modal, kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan sub kegiatan penyediaan

layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perubahan Renja (DPMPTSP) 2022  
Kota Pasuruan

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>INDIKATOR URUSAN</b>											
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	2%	1.48%	1.67%	1.86%	2.86%	0.60%	1.67%	1.86%	Data nilai realisasi capaian investasi sampai dengan bulan Maret (Tribulan 1) tahun 2022
2	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>											
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		IKK	2%	1.48%	1.67%	1.86%	2.86%	0.60%	1.67%	1.86%	Data nilai realisasi capaian investasi sampai dengan bulan Maret (Tribulan 1) tahun 2022
3	<b>INDIKATOR SASARAN</b>											
1	Jumlah Nilai Investasi		IKU	245,356 MRp	250.264 MRp	255.269 MRp	260.374 MRp	252.987 MRp	76.206 MRp	255.269 MRp	260.374 MRp	Data nilai realisasi capaian investasi bulan Maret (Tribulan 1) tahun 2022

2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan penanaman Modal		IKU	83.56	84.34	84.85	85.2	84.34	-	84.85	85.2	Perhitungan IKM persemester yaitu semester I dan II
---	---	--	-----	-------	-------	-------	------	-------	---	-------	------	---

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan misi, tujuan dan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

▪ Permasalahan :

1. Belum adanya pemetaan data potensi;
2. Belum adanya regulasi yang cukup responsif bagi pengembangan iklim penanaman modal;
3. Pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi masih belum optimal;
4. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Kurang tersedianya data dan informasi penanaman modal;
6. Kurang optimalnya promosi dan kerjasama swasta dengan pelaku usaha (kecil mikro);
7. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha akan mekanisme dan prosedur perizinan, khususnya perizinan usaha elektronik;
8. Minim tersedianya data dan informasi penanaman modal yang memadai;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pelayanan perizinan.

▪ Isu Strategis :

1. Penyusunan data potensi investasi yang akurat;
2. Updating regulasi disesuaikan dengan pengembangan iklim;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan akses;
4. Penyusunan data potensi investasi yang akurat dan informative;
5. Sinkronisasi data digital penanaman modal;

6. Peningkatan kerjasama, koordinasi yang solid serta pola kemitraan dengan stakeholder;
7. Optimalisasi media komunikasi dan informasi sebagai sarana sosialisasi perizinan usaha elektronik terintegrasi;
8. Updating media komunikasi dan informasi penanaman modal;
9. Penyusunan regulasi pendukung pelayanan perizinan berbasis TI.

Sebagai lembaga daerah, DPMPTSP harapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mengakomodasi keinginan investor/ pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel yang mendukung Visi Walikota dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang berbunyi Pasuruan Kota Madinah (Maju Ekonominya, Indah Kota nya, Harmonis Warganya), Harmonis Warganya yang masuk pada Misi ke IV yaitu: Transformasi Layanan Publik Yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi Yang Adaptif. Membangun sistem ini bukanlah hal mudah, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara DPMPTSP dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Faktor lain untuk mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah regulasi kapastian hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana, baik sarana fisik, kelayakan fungsi bangunan maupun dukungan teknologi informatika. Hal lain yang menjadi faktor pendukung yaitu faktor kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan maupun etika.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam proses penyusunan Renja. RKPD merupakan penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah,

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, tujuan dari sistem perencanaan adalah :

1. Meningkatkan kesempatan kerja, melalui penguatan peran *tradeable sectors* yang bertumpu pada industri kecil menengah (IKM) dan pedagang pasar tradisional
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan indeks pembangunan manusia di Kota Pasuruan
3. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan pelayanan publik, dengan mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan

Adapun Review terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023, DPMPTSP Kota Pasuruan terdiri dari 6 Program, 12 kegiatan, 32 sub kegiatan, disajikan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel. 2.4**  
**Reviu Terhadap Rancangan P-RKPD Tahun 2023**  
**Kota pasuruan**

**NAMA PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
PASURUAN**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,002,294,091	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,402,294,091	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7,002,294,091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan			7,402,294,091	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	4,254,056,797	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	4,254,056,797	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu (90%)	90%	26,108,290	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu (90%)	90%	26,108,290	

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	4 Dokumen	7,089,840	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	4 Dokumen	7,089,840	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 laporan)	4 Laporan	9,018,450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 laporan)	4 Laporan	9,018,450	
1.1.3	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 laporan)	1 Laporan	10,000,000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 laporan)	1 Laporan	10,000,000	
1.2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>3,401,172,646</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>3,401,172,646</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (40 orang)	40 Orang	3,321,926,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (40 orang)	40 Orang	3,321,926,200	
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (8 laporan)	8 Laporan	79,246,446	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (8 laporan)	8 Laporan	79,246,446	

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu (90%)	0.9	50,283,210	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu (90%)	0.9	50,283,210
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)	4 Laporan	50,283,210	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)	4 Laporan	50,283,210
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya (90%)	0.9	51,864,610	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya (90%)	0.9	51,864,610
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (32 paket)	32 Paket	11,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (32 paket)	32 Paket	11,200,000
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 dokumen)	5 Dokumen	3,505,590	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 dokumen)	5 Dokumen	3,505,590
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (40 orang)	40 Orang	37,159,020	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (40 orang)	40 Orang	37,159,020
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor (90%)	0.9	187,257,530	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor (90%)	0.9	187,257,530

1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (8 paket)	8 Paket	3,870,420	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (8 paket)	8 Paket	3,870,420	
1.5.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (125 laporan)	125 Laporan	149,828,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (125 laporan)	125 Laporan	149,828,000	
1.5.3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (4 laporan)	4 Laporan	8,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (4 laporan)	4 Laporan	8,000,000	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (12 dokumen)	12 Dokumen	3,520,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (12 dokumen)	12 Dokumen	3,520,800	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 paket)	7 Paket	22,038,310	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 paket)	7 Paket	22,038,310	
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>36,819,200</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>36,819,200</b>	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (4 unit)	4 Unit	25,799,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (4 unit)	4 Unit	25,799,200	

1.6.2	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (20 unit)	20 unit	11,020,000	Pengadaan Mebel	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (20 unit)	20 unit	11,020,000	
1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (90%)</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (90%)</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 laporan)	4 Laporan	3,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 laporan)	4 Laporan	3,300,000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	12 Laporan	115,079,816	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	12 Laporan	115,079,816	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	12 Laporan	121,103,750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	12 Laporan	121,103,750	
1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>261,067,745</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (90%)</b>	<b>0.9</b>	<b>261,067,745</b>	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (8 unit)	8 Unit	85,149,994	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (8 unit)	8 Unit	85,149,994	

1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (5 unit)	5 Unit	74,295,451	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (5 unit)	5 Unit	74,295,451	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (57 unit)	57 Unit	39,450,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (57 unit)	57 Unit	39,450,000	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	1 Unit	62,172,300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	1 Unit	62,172,300	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	0	-	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	0	-	
2.1	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Pasuruan	<b>Jumlah Investor</b>	0	-	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Pasuruan	<b>Jumlah Investor</b>	0	-	
2.1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	0	-	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	0	-	
2.1.2	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman	0	-	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman	0	-	

			modal					modal			
2.1.3	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Potensi Investasi	0	-	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Potensi Investasi	0	-	
2.1.4	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	0	-	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	0	-	
2.1.5	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	0	-	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	0	-	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat</b>	10	392,415,940	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat</b>	10	392,415,940	
3.1	<b>Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Pasuruan	<b>Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	10	392,415,940	<b>Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Pasuruan	<b>Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	10	392,415,940	
3.1.1	Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	
3.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar Kota dan Luar Propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (4 dokumen)	4 Dokumen	392,415,940	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Luar Kota dan Luar Propinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (4 dokumen)	4 Dokumen	392,415,940	

4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	80	2,040,683,494	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	80	2,440,683,494
4.1	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	1500 Izin	2,040,683,494	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	1500 Izin	2,440,683,494
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	1,834,829,144	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	2,234,829,144
4.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (300 Kegiatan Usaha)	300 Kegiatan usaha	47,458,750	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (300 Kegiatan Usaha)	300 Kegiatan usaha	47,458,750

4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinann (50 orang)	50 orang	134,999,800	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinann (50 orang)	50 orang	134,999,800
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah (10 Kegiatan Usaha)	10 Kegiatan Usaha	23,395,800	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah (10 Kegiatan Usaha)	10 Kegiatan Usaha	23,395,800
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman moda (70%)</b>	0.7	194,472,070	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman moda (70%)</b>	0.7	194,472,070
5.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (30 Pelaku Usaha)	30 Pelaku Usaha	194,472,070	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (30 Pelaku Usaha)	30 Pelaku Usaha	194,472,070

5.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (60 kegiatan usaha)	60 Kegiatan Usaha	36,967,710	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (60 kegiatan usaha)	60 Kegiatan Usaha	36,967,710
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (100 pelaku usaha)	100 Pelaku Usaha	114,134,770	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (100 pelaku usaha)	100 Pelaku Usaha	114,134,770
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (60 Kegiatan Usaha)	60 Kegiatan Usaha	43,369,590	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Pasuruan	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (60 Kegiatan Usaha)	60 Kegiatan Usaha	43,369,590
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan (15%)</b>	0.15	120,665,790	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Pasuruan	<b>Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan (15%)</b>	0.15	120,665,790
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi (15 Data)	15 data	120,665,790	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi (15 Data)	15 data	120,665,790

6.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (3 Dokumen)	3 Dokumen	120,665,790	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (3 Dokumen)	3 Dokumen	120,665,790
-------	--	---------------	--	-----------	-------------	--	---------------	--	-----------	-------------

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan sampai kota, para stake holder dan masyarakat melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan untuk diakomodir dalam kegiatan OPD yang membidangi masing – masing kegiatan. Dengan Musrenbang diharapkan sasaran, lokasi kegiatan dan anggaran yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk usulan program dan kegiatan Perubahan dari para pemangku kepentingan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan tahun 2023 tidak ada atau nihil, hal ini menunjukkan tidak adanya tuntutan masyarakat pada DPMPTSP untuk meningkatkan peranan sosialisasi dan fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi, namun ini menjadi inisiatif DPMPTSP untuk meningkatkan strategi promosi dan informasi yang merupakan media yang penting untuk menawarkan potensi investasi daerah, sehingga masyarakat paham terhadap juknis mekanisme Perizinan yang selanjutnya tentu akan meningkatkan minat investasi.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2023 Kota Pasuruan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### BAB III

### 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari pembangunan jangka panjang nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah Kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang sesuai dengan tema RPJMN IV “ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.”

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6,0% per Tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5 – 7,0 %, tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 4,0 – 4,6 % dan gini ratio mencapai 0,370 – 0,374 %. Target RPJMN ini menghadapi tantangan kondisi ekonomi global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal 2020. Pada Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mengusung tema “Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan reformasi sosial” dengan target pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didorong dari 3 sektor prioritas RKP 2021, yaitu sektor industri, sektor pariwisata dan peningkatan sektor investasi pasca implementasi Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mendukung visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah “ Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil dan sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan Kota Pasuruan.”

Sementara visi Pemerintah Kota Pasuruan yaitu : “Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis” yang bermakna Maju dan berkembang perekonomiannya. Aman dan damai dijadikan sebagai tempat dan tinggal. Indah lanskap tata kotanya. Harmonis dan guyub kehidupan warganya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Renja DPMPTSP akan ditempuh melalui misi :

- Ke-1 (satu) : Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
- Ke-4 (empat) : Transformasi layanan publik yang udah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Untuk mencapai misi tersebut DPMPTSP menentukan tujuan dan asaran serta program dan kegiatan yang menunjang.

Berikut adalah Sasaran dan Rencana Capaian Kinerja Tahun 2022 DPMPTSP Kota Pasuruan :

**Tabel 3.1**  
**Rencana Capaian Kinerja Tahun 2023 DPMPTSP Kota Pasuruan**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2023
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1.67%	Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	Milyar (Rp)	255,269,339,600
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	IKM	84.85

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun Tahun 2023 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Kota Pasuruan untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif. DPMPTSP menyusun kegiatan dengan fokus kepada penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal dan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) program rutin, 8 (delapan) kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, sedangkan untuk program prioritas 2 (dua) program, 2 (dua) sub kegiatan, serta program pendukung prioritas terdiri dari 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, Adapun rinciannya pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Rencana Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2023 Sesuai Kepmendagri  
050\_5889 Tahun 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realkisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi barang Milik daerah Pada Perangkat daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB

IV

BAB

III

### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana program dan kegiatan ditahun 2023 pada DPMPSTP Kota Pasuruan yang diusulkan pendanaanya ialah melalui beberapa sumber dana diantaranya, sumber dana APBN dan APBD Kota yang telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Pasuruan, melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*).

Adapun Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 maju indikatif tahun 2024 pada DPMPSTP Kota Pasuruan dapat di lihat pada tabel 4.1. :

TABEL 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,402,294,091	DAU			7,014,357,516			
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kota Pasuruan		7,402,294,091	DAU			7,014,357,516			
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	4,254,056,797	DAU	90%	4,254,056,797		
2	18	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu (90%)	Kota Pasuruan	90%	26,108,290	DAU	90%	26,108,290

2	18	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	Kota Pasuruan	4 Dokumen	7,089,840	DAU		4 Dokumen	7,089,840
2	18	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	9,018,450	DAU		4 Laporan	9,018,450
2	18	1	2	1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 laporan)	Kota Pasuruan	1 Laporan	10,000,000	DAU		1 Laporan	10,000,000
2	18	1	2	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>3,401,172,646</b>	<b>DAU</b>		<b>80</b>	<b>3,401,172,646</b>
2	18	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	3,321,926,200	DAU		40 Orang	3,321,926,200
2	18	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (8 laporan)	Kota Pasuruan	8 Laporan	79,246,446	DAU		8 Laporan	79,246,446

2	18	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu (90%)	Kota Pasuruan	90%	50,283,210	DAU		90%	50,283,210
2	18	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	50,283,210	DAU		4 Laporan	50,283,210
2	18	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya (90%)	Kota Pasuruan	90%	51,864,610			90%	51,864,610
2	18	1	2	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	Kota Pasuruan	32 Paket	11,200,000	DAU		32 Paket	11,200,000
2	18	1	2	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 dokumen)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	3,505,590	DAU		5 Dokumen	3,505,590
2	18	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	37,159,020	DAU		40 Orang	37,159,020
2	18	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor (90%)	Kota Pasuruan	90%	187,257,530	DAU		0.9	187,257,530

2	16	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (8 paket)	Kota Pasuruan	8 Paket	3,870,420	DAU	8 Paket	3,870,420
2	16	1	2	6	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (125 laporan)	Kota Pasuruan	125 Laporan	149,828,000	DAU	125 Laporan	149,828,000
2	16	1	2	6	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	8,000,000	DAU	4 Laporan	8,000,000
2	16	1	2	6	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (12 dokumen)	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3,520,800	DAU	12 Dokumen	3,520,800
2	16	1	2	6	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 paket)	Kota Pasuruan	7 Paket	22,038,310	DAU	7 Paket	22,038,310
2	18	1	2	7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>	<b>DAU</b>	<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>
2	18	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (4 unit)	Kota Pasuruan	4 Unit	25,799,200	DAU	4 Unit	25,799,200

2	18	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (20 unit)	Kota Pasuruan	20 unit	11,020,000	DAU	20 Unit	11,020,000
2	18	1	2	8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>	<b>DAU</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>
2	18	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	3,300,000	DAU	4 Laporan	3,300,000
2	18	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	115,079,816	DAU	12 Laporan	115,079,816
2	18	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	121,103,750	DAU	12 Laporan	121,103,750
2	18	1	2	9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>261,067,745</b>	<b>DAU</b>	<b>90%</b>	<b>261,067,745</b>
2	18	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (8 unit)	Kota Pasuruan	8 Unit	85,149,994	DAU	8 Unit	85,149,994

2	18	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (5 unit)	Kota Pasuruan	5 Unit	74,295,451	DAU	5 Unit	74,295,451
2	18	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (57 unit)	Kota Pasuruan	57 Unit	39,450,000	DAU	57 Unit	39,450,000
2	18	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	Kota Pasuruan	1 Unit	62,172,300	DAU	1 Unit	62,172,300
2	18	2				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	18	2	2	1		<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	18	2	2	1	2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	Kota Pasuruan	0	-	DAU	0	0
2	18	2	2	1	X	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Pasuruan	0	-	DAU	-	-
2	18	2	2	2		<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>

2	18	2	2	2	1	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU	-	-
2	18	2	2	2	2	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU	-	0
2	18	3				<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>10</b>	<b>392,415,940</b>		<b>1</b>	<b>392,416,180</b>
2	18	4	2	1		<b>Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>10</b>	<b>392,415,940</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>392,416,180</b>
2	18	3	2	1	1	Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	0	-	DAU	0	0
2	18	3	2	1	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (4 dokumen)	Luar Kota dan Luar Propinsi	4 Dokumen	392,415,940	DAU	0	392,416,180
2	18	4				<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>80</b>	<b>2,440,683,494</b>	<b>DAU</b>	<b>70</b>	<b>2,043,023,074</b>

2	18	4	2	1		Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Pasuruan	1500 Izin	2,440,683,494	0	0	0	2,043,023,074
2	18	4	2	1	1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	300 Pelaku Usaha	2,234,829,144	DAU		300 Pelaku Usaha	1,834,829,144
2	18	4	2	1	2	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (300 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	300 Kegiatan usaha	47,458,750	DAU		300 Kegiatan usaha	47,458,750
2	18	4	2	1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinnann (50 orang)	Kota Pasuruan	50 orang	134,999,800	DAU		50 orang	134,999,800
2	18	4	2	1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah (10 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	10 Kegiatan Usaha	23,395,800	DAU		10 Kegiatan Usaha	25,735,380

2	18	5					<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman moda (70%)	Kota Pasuruan	70%	194,472,070	DAU		70%	204,195,675
2	18	5	2	1			<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (30 Pelaku Usaha)	Kota Pasuruan	30 Pelaku Usaha	194,472,070	DAU		30 Pelaku Usaha	204,195,675
2	18	5	2	1	1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (60 kegiatan usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	36,967,710	DAU		60 Kegiatan Usaha	38,816,096
2	18	5	2	1	2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (100 pelaku usaha)	Kota Pasuruan	100 Pelaku Usaha	114,134,770	DAU		100 Pelaku Usaha	119,841,509
2	18	5	2	1	3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (60 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	43,369,590	DAU		60 Kegiatan Usaha	45,538,070

2	18	6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan (15%)	Kota Pasuruan	15%	120,665,790	DAU		15%	120,665,790
2	18	6	2	1		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi (15 Data)	Kota Pasuruan	15 data	120,665,790	DAU		15 data	120,665,790
2	18	6	2	1	1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (3 Dokumen)	Kota Pasuruan	3 Dokumen	120,665,790	DAU		3 Dokumen	120,665,790

TABEL 4.2

PEMETAAN SASARAN DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PASURUAN

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,402,294,091	DAU			7,014,357,516
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Kota Pasuruan		7,402,294,091	DAU			7,014,357,516
Meningkatnya Sistem tata Kelolah Yang Baik Dalam Manjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	4,254,056,797	DAU		90%	4,254,056,797

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu (90%)	Kota Pasuruan	90%	26,108,290	DAU		90%	26,108,290
	Persentase Temuan Anggaran Yang Ditindaklanjuti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	Kota Pasuruan	4 Dokumen	7,089,840	DAU		4 Dokumen	7,089,840
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	9,018,450	DAU		4 Laporan	9,018,450
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 laporan)	Kota Pasuruan	1 Laporan	10,000,000	DAU		1 Laporan	10,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (90%)	Kota Pasuruan	90%	3,401,172,646	DAU		80	3,401,172,646
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	3,321,926,200	DAU		40 Orang	3,321,926,200

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (8 laporan)	Kota Pasuruan	8 Laporan	79,246,446	DAU		8 Laporan	79,246,446
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu (90%)</b>	Kota Pasuruan	90%	50,283,210	DAU		90%	50,283,210
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	50,283,210	DAU		4 Laporan	50,283,210
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya (90%)</b>	Kota Pasuruan	90%	51,864,610			90%	51,864,610
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	Kota Pasuruan	32 Paket	11,200,000	DAU		32 Paket	11,200,000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 dokumen)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	3,505,590	DAU		5 Dokumen	3,505,590

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	37,159,020	DAU		40 Orang	37,159,020
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>187,257,530</b>	<b>DAU</b>		<b>0.9</b>	<b>187,257,530</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (8 paket)	Kota Pasuruan	8 Paket	3,870,420	DAU		8 Paket	3,870,420
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (125 laporan)	Kota Pasuruan	125 Laporan	149,828,000	DAU		125 Laporan	149,828,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	8,000,000	DAU		4 Laporan	8,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (12 dokumen)	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3,520,800	DAU		12 Dokumen	3,520,800

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 paket)	Kota Pasuruan	7 Paket	22,038,310	DAU		7 Paket	22,038,310
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>	<b>DAU</b>		<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (4 unit)	Kota Pasuruan	4 Unit	25,799,200	DAU		4 Unit	25,799,200
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (20 unit)	Kota Pasuruan	20 unit	11,020,000	DAU		20 Unit	11,020,000
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>	<b>DAU</b>		<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	3,300,000	DAU		4 Laporan	3,300,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	115,079,816	DAU		12 Laporan	115,079,816

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	121,103,750	DAU		12 Laporan	121,103,750
<b>Meningkatnya Nilai Investasi</b>	<b>Jumlah Nilai Investasi</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (90%)</b>	Kota Pasuruan	90%	261,067,745	DAU		90%	261,067,745
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (8 unit)	Kota Pasuruan	8 Unit	85,149,994	DAU		8 Unit	85,149,994
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (5 unit)	Kota Pasuruan	5 Unit	74,295,451	DAU		5 Unit	74,295,451
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (57 unit)	Kota Pasuruan	57 Unit	39,450,000	DAU		57 Unit	39,450,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	Kota Pasuruan	1 Unit	62,172,300	DAU		1 Unit	62,172,300

Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
		<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Investor	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	-
		<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Potensi Investasi	Kota Pasuruan	0	-	DAU			0
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	-
		Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	0

Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat	Kota Pasuruan	10	392,415,940			1	392,416,180
		Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi	Kota Pasuruan	10	392,415,940	DAU		0	392,416,180
		Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (4 dokumen)	Luar Kota dan Luar Propinsi	4 Dokumen	392,415,940	DAU		0	392,416,180
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	Kota Pasuruan	80	2,440,683,494	DAU		70	2,043,023,074
		Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Pennaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Pasuruan	1500 Izin	2,440,683,494	0	0	0	2,043,023,074

		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	300 Pelaku Usaha	2,234,829,144	DAU		300 Pelaku Usaha	1,834,829,144
		Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (300 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	300 Kegiatan usaha	47,458,750	DAU		300 Kegiatan usaha	47,458,750
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinann (50 orang)	Kota Pasuruan	50 orang	134,999,800	DAU		50 orang	134,999,800
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah (10 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	10 Kegiatan Usaha	23,395,800	DAU		10 Kegiatan Usaha	25,735,380

Meningkatnya Nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman moda (70%)	Kota Pasuruan	70%	194,472,070	DAU	70%	204,195,675
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (30 Pelaku Usaha)	Kota Pasuruan	30 Pelaku Usaha	194,472,070	DAU	30 Pelaku Usaha	204,195,675
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (60 kegiatan usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	36,967,710	DAU	60 Kegiatan Usaha	38,816,096
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (100 pelaku usaha)	Kota Pasuruan	100 Pelaku Usaha	114,134,770	DAU	100 Pelaku Usaha	119,841,509
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (60 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	43,369,590	DAU	60 Kegiatan Usaha	45,538,070

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan (15%)	Kota Pasuruan	15%	120,665,790	DAU		15%	120,665,790
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi (15 Data)	Kota Pasuruan	15 data	120,665,790	DAU		15 data	120,665,790
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (3 Dokumen)	Kota Pasuruan	3 Dokumen	120,665,790	DAU		3 Dokumen	120,665,790

**TABEL 4.3**  
**Rekapitulasi Program Kegiatan Berdasarkan Prioritas Nasional Tahun 2023**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**  
**KOTA PASURUAN**

PROGRAM NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,402,294,091	DAU			7,014,357,516
Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Kota Pasuruan		7,402,294,091	DAU			7,014,357,516
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Kota Pasuruan	90%	4,254,056,797	DAU		90%	4,254,056,797
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu (90%)	Kota Pasuruan	90%	26,108,290	DAU		90%	26,108,290

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen)	Kota Pasuruan	4 Dokumen	7,089,840	DAU		4 Dokumen	7,089,840
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	9,018,450	DAU		4 Laporan	9,018,450
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 laporan)	Kota Pasuruan	1 Laporan	10,000,000	DAU		1 Laporan	10,000,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>3,401,172,646</b>	<b>DAU</b>		<b>80</b>	<b>3,401,172,646</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	3,321,926,200	DAU		40 Orang	3,321,926,200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (8 laporan)	Kota Pasuruan	8 Laporan	79,246,446	DAU		8 Laporan	79,246,446

	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	90%	50,283,210	DAU		90%	50,283,210
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	50,283,210	DAU		4 Laporan	50,283,210
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	90%	51,864,610			90%	51,864,610
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (32 paket)	Kota Pasuruan	32 Paket	11,200,000	DAU		32 Paket	11,200,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (5 dokumen)	Kota Pasuruan	5 Dokumen	3,505,590	DAU		5 Dokumen	3,505,590
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (40 orang)	Kota Pasuruan	40 Orang	37,159,020	DAU		40 Orang	37,159,020
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya layanan administrasi Kantor (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	90%	187,257,530	DAU		0.9	187,257,530

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (8 paket)	Kota Pasuruan	8 Paket	3,870,420	DAU		8 Paket	3,870,420
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (125 laporan)	Kota Pasuruan	125 Laporan	149,828,000	DAU		125 Laporan	149,828,000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	8,000,000	DAU		4 Laporan	8,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (12 dokumen)	Kota Pasuruan	12 Dokumen	3,520,800	DAU		12 Dokumen	3,520,800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (7 paket)	Kota Pasuruan	7 Paket	22,038,310	DAU		7 Paket	22,038,310
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>	<b>DAU</b>		<b>90%</b>	<b>36,819,200</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (4 unit)	Kota Pasuruan	4 Unit	25,799,200	DAU		4 Unit	25,799,200

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (20 unit)	Kota Pasuruan	20 unit	11,020,000	DAU	20 Unit	11,020,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>	<b>DAU</b>	<b>90%</b>	<b>239,483,566</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 laporan)	Kota Pasuruan	4 Laporan	3,300,000	DAU	4 Laporan	3,300,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	115,079,816	DAU	12 Laporan	115,079,816
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)	Kota Pasuruan	12 Laporan	121,103,750	DAU	12 Laporan	121,103,750
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (90%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>90%</b>	<b>261,067,745</b>	<b>DAU</b>	<b>90%</b>	<b>261,067,745</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (8 unit)	Kota Pasuruan	8 Unit	85,149,994	DAU	8 Unit	85,149,994

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (5 unit)	Kota Pasuruan	5 Unit	74,295,451	DAU		5 Unit	74,295,451
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (57 unit)	Kota Pasuruan	57 Unit	39,450,000	DAU		57 Unit	39,450,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1 unit)	Kota Pasuruan	1 Unit	62,172,300	DAU		1 Unit	62,172,300
<b>Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Investor</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Buku Data Perkembangan Investasi	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah penetapan kebijakan daerah mengenai pemerian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	-

	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Potensi Investasi</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>			<b>0</b>
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	-
	Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	0	-	DAU		-	0
<b>Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>10</b>	<b>392,415,940</b>			<b>1</b>	<b>392,416,180</b>
<b>Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif</b>	<b>Kegiatan Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modl Yang Menjadi Kemenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase investor yang menyatakan berminat dalam promosi</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>10</b>	<b>392,415,940</b>	<b>DAU</b>		<b>0</b>	<b>392,416,180</b>
	Sub Kegiatan Peyusunan Strategi Promosi Penanman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	0	-	DAU		0	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (4 dokumen)	Luar Kota dan Luar Propinsi	4 Dokumen	392,415,940	DAU		0	392,416,180

Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Masyarakat yang Puas atas Pelayanan Perijinan	Kota Pasuruan	80	2,440,683,494	DAU		70	2,043,023,074
Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah	Jumlah Layanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Pasuruan	1500 Izin	2,440,683,494	0	0	0	2,043,023,074
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pasuruan	300 Pelaku Usaha	2,234,829,144	DAU		300 Pelaku Usaha	1,834,829,144
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (300 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	300 Kegiatan usaha	47,458,750	DAU		300 Kegiatan usaha	47,458,750

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinann (50 orang)	Kota Pasuruan	50 orang	134,999,800	DAU		50 orang	134,999,800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Inentif Daerah (10 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	10 Kegiatan Usaha	23,395,800	DAU		10 Kegiatan Usaha	25,735,380
Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Presentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman moda (70%)	Kota Pasuruan	70%	194,472,070	DAU		70%	204,195,675
Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan diawasi (30 Pelaku Usaha)	Kota Pasuruan	30 Pelaku Usaha	194,472,070	DAU		30 Pelaku Usaha	204,195,675

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (60 kegiatan usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	36,967,710	DAU		60 Kegiatan Usaha	38,816,096
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (100 pelaku usaha)	Kota Pasuruan	100 Pelaku Usaha	114,134,770	DAU		100 Pelaku Usaha	119,841,509
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan (60 Kegiatan Usaha)	Kota Pasuruan	60 Kegiatan Usaha	43,369,590	DAU		60 Kegiatan Usaha	45,538,070
<b>Program Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipublikasikan (15%)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>15%</b>	<b>120,665,790</b>	<b>DAU</b>		<b>15%</b>	<b>120,665,790</b>
<b>Program Prioritas Daerah Reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Darah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi (15 Data)</b>	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>15 data</b>	<b>120,665,790</b>	<b>DAU</b>		<b>15 data</b>	<b>120,665,790</b>

	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (3 Dokumen)	Kota Pasuruan	3 Dokumen	120,665,790	DAU		3 Dokumen	120,665,790
--	--	--	---------------	-----------	-------------	-----	--	-----------	-------------

**PENUTUP****BAB  
V****5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

1. Bahwa didalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2023 telah mengacu pada ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang direncanakan mengacu pada RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan Renstra serta RKPD.
3. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program / kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan skala prioritas dan tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2023 yaitu “Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah”, sehingga diharapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah dirancang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

**5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, akuntabel,

transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) kota Pasuruan, serta masyarakat termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD 2021-2026 dengan sebaik baiknya;
2. OPD kota Pasuruan, berkewajiban menyusun rencana strategis ( Renstra ) yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD kota Pasuruan 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD
3. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
4. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
5. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan Perizinan terpadu;
6. Pembinaan terhadap pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 5.3 Rencana tindak lanjut

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Kota Pasuruan sebagai lembaga PTSP Kota Pasuruan diberi kewenangan untuk menangani 10 sektor / 51 jenis Perizinan, sehingga ke depan akan berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana program, pelayanan publik, alur proses pelayanan Perizinan yang efisien dengan biaya rendah serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan disusunnya Rencana Kerja tahun 2023 ini diharapkan pengembangan penanaman modal dan Perizinan dapat diwujudkan secara terencana dan semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan



**INDRA GUNAWAN, ST, MT**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005